

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Daerah Provinsi Gorontalo masih tergolong rendah, artinya Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan terhadap pendapatan transfer pusat sehingga rasio kemandiriannya meningkat.
- 2) Dari hasil pengukuran kinerja keuangan daerah yang dilihat dari rasio ketergantungan menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Gorontalo tergolong tinggi hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo masih bergantung kepada pemerintah pusat.
- 3) Berdasarkan hasil rasio efektivitas di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD Provinsi Gorontalo pada periode 2015-2019 menunjukkan 2 kriteria yaitu tidak efektif dalam kurun waktu 2015-2017 dan pada tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada di kriteria efektif. Artinya PAD Provinsi Gorontalo pada periode 2015-2017 tidak terealisasi dan pada tahun 2018-2019 terealisasi dan dapat dioptimalkan.
- 4) Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ini dapat melihat rasio derajat desentralisasi fiskal. Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal Provinsi Gorontalo Pada periode 2015-2019 sebesar 19,91%, hal ini apabila di

hubungkan dengan tingkat derajat desentralisasi masih di kategorikan Kurang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi saran kepada pemerintah, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

1. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
3. Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). Akuntansi sektor publik : Akuntansi keuangan daerah edisi 3. Jakarta: Salemba empat.
- Abdul, H. (2008). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba empat.
- Abdul, H. (2012). Akuntansi keuangan daerah: Akuntansi sektor publik Jakarta: Salemba empat.
- Agustina, M dan Cristiawan. YJ. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan. *Business accounting review*, Vol 3 No1, PP, 223-232.
- Agustina, O. (2013). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: Studi kasus Kota Malang tahun anggaran 2007-2011.
- Ami, K Dan Dephy, N. (2016). Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Dki Jakarta. 7 Agustus, 13 (1)(2), 13.
- Anita W. (2001). Kemampuan keuangan daerah. *Jurnal kebijakan dan administrasi publik* Vol 5 No 2 November.
- Bangun, A. (2009). Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi kinerja manajerial SKPD dengan penguasaan internal sebagai variabel pemoderasi (Studi kasus pada pemerintahan deli serdang) Thesis UNSUT Medan.
- Budi, S. (2015). Pengaruh idenpendensi, kualitas audit, dan mekanisme corporate governance terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di *BEI Tahun 2019-2011*.
- Cristina, I, T dan Jimmi A, D. (2018). Analisis rasio untuk pengukuran kinerja keuangan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah (Studi kasus Pemerintah Kota Jaya Pura).
- Darman. (2016). Teori keagenan. *Jurnal keuangan daerah*.
- Dihan, L. (2013). Analysis of the effect of regional financial performance to economic growth and poverty capital expenditure (Case study of 38 regencies/cities in east java province). *Journal of economics and sustainble development*, 4 (19): 7-17.
- Handika, S, B. (2016). Evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang (Studi pada badan pengelolah keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) SKRIPSI.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No 1 Tentang laporan keuangan- edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT.Raja Grafindo
- Indah, L. (2017). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2011-2015 (studi kasus pada Pemerintah Kota Palembang).
- Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik Yogyakarta: Penerbit UII Pres.
- Mariani, L. (2013). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah pemekaran daerah (studi empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatra Barat, Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Martina, H dan Renata, H. (2016). Assessment of financial capabilities of local governments in EU countries of the development of local services. *Journal of local self-government*, 14 (3): 379397.
- Mohamad, M, F. S, dan H. A. P. (2007). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta .
- Mohamad, M. (2012). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah edisi 4. Penerbit salemba empat. Jakarta.
- Nugroho dan Rohman. (2012). Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah dengan PAD Sebagai variabel interdening (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah).
- Paramono J. (2014). Analisis keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Vol. 7. No 13: 83-112.
- Partiwi NM. (2017). Evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (Dppka) daerah istimewa Yogyakarta. Skripsi: Fakultas Ekonomi UNY.
- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., N. B. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa. *EMBA*, 3 (4), 23–32.
- Rosemarry, Chin J., dan B. B. (2016). Local government financial autonomy: A comparative ofc Nigeria and Brazil. *Arabian jurnal of business and management review (OMAN Chapter)*, 5 (10): 38-54.
- Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi sektor publik (Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis aktual). Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Sri A, L. G., & Taras, T. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (pad) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten badung bali. *E-jurnal manajemen*

universitas udayana, 6(5), 249569.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (Mix Methos)*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati D, dkk. (2018). Menilai kinerja keungan dengan analisis rasio keungan: Studi kasus BKAD Slemen. *Jurnal akuntansi terapan Indonesia*. Vol. 1, No.2 Hal. 92-99.

Syukri, Hinaya. (2019). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan*.

Undang-undang No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>